



Belanja Publik Dominan

Postur APBD Badung Dinilai "Cantik"

DIDOMINASI belanja publik, postur APBD Badung dinilai sangat cantik. Hal ini dikemukakan Fraksi Golkar DPRD Badung pada rapat paripurna DPRD Badung untuk mendengarkan pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap enam ranperda, Rabu (29/7) kemarin. Ranperda tersebut meliputi Ranperda Kebijakan Umum APBD (KUA) 2016, Ranperda Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Tiga lainnya adalah Ranperda KUA Perubahan 2015, Ranperda PPAS Perubahan 2015, dan Ranperda APBD Perubahan 2015.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Nyoman Giri Prasta, S.Sos. dan dihadiri Bupati Badung, A.A. Gde Agung, S.H., Wabup Badung Made Sudiana, S.H., M.Si. dan kepala SKPD di lingkungan Pemkab Badung. Rapat dihadiri mayoritas anggota Dewan. Dalam

PU yang dibacakan Wayan Suyasa, S.H., Fraksi Golkar menyatakan belanja publik yang diproyeksikan pada masing-masing SKPD memiliki program yang benar-benar inovatif melalui manajemen yang benar-benar berbasis kinerja. "Melalui pendekatan identifikasi kebutuhan rakyat, terukur, riil, transparan dan akuntabel," tegasnya.

Selain itu, katanya, makin tinggi capaian APBD akan berbanding positif dengan menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, makin cerdasnya rakyat, dan makin membanggakan derajat kesehatan masyarakat Badung, sehingga indeks pembangunan manusia makin baik. Menurut catatan, belanja daerah pada 2016 dirancang Rp 3,59 triliun. Belanja tidak langsung dirancang Rp 2,07 triliun dan belanja langsung dirancang Rp 1,52 triliun. "Pembiayaan daerah dirancang Rp 4,8 miliar," ungkapnya.

Dari aspek manfaat, sebagian besar

merupakan belanja publik yang manfaatnya langsung diterima masyarakat, yaitu 68,98 persen dan belanja aparatur hanya 31,02 persen. Karena itu, fraksi yang dipimpin IGN Saskara ini bisa menerima ranperda yang diajukan tersebut menjadi perda.

Sikap sama disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung. Melalui juru bicaranya I Gusti Anom Gumanti, fraksi terbesar di DPRD Badung tersebut dapat menyetujui keenam ranperda untuk disahkan menjadi perda. Fraksi ini memberikan apresiasi kepada Bupati Badung karena dalam menyusun dokumen anggaran daerah tahun 2016 maupun APBD Perubahan 2015, mencermati perkembangan dan dinamika perekonomian global.

Sikap sama disampaikan Fraksi Demokrat DPRD Badung. Lewat juru bicaranya Nyoman Oka Widyanta, fraksi ini bisa menerima ranperda untuk disahkan menjadi perda. Satu catatan fraksi ini, terkait sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang cukup tinggi mencapai Rp 198 miliar. "Ke depan perencanaan anggaran perlu lebih matang dan akurat, walaupun disadari silpa bukan semata-mata karena salah perencanaan, tetapi dapat juga karena efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan yang signifikan," katanya.

Apresiasi juga datang dari Fraksi Gerindra DPRD Badung. Melalui juru bicaranya I Nyoman Sentana, S.H., fraksi ini mengapresiasi Bupati karena mampu menyelesaikan keenam ranperda untuk selanjutnya dibahas sebagai bahan evaluasi. Setiap tahun, PAD senantiasa meningkat secara signifikan. Demikian pula dari sisi manfaat, pada umumnya telah berpihak kepada hak-hak rakyat. (ad1604)



PARIPURNA - Rapat paripurna DPRD Badung untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap enam ranperda, Rabu kemarin.

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal : 2



Kasus Korupsi PIPANISASI Karangasem

Pejabat PPTK Dituntut Dua Tahun Penjara ✓

Denpasar (Bali Post) -

Ir. I.B. Made Oka, terdakwa kasus dugaan korupsi pipanisasi di Karangasem, Rabu (29/7) kemarin dituntut hukuman selama dua tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Putu Gede Juliarsana. Jaksa di depan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi menyatakan terdakwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) itu bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yakni secara berlanjut telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, atau kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Atas perbuatannya itu, terdakwa dituntut hukuman penjara selama dua tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan. Di samping itu, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan. Jaksa dalam suratuntutannya menjerat terdakwa dengan Pasal 3 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelum pada pembacaan tuntutan tersebut, jaksa lebih dahulu membacakan sejumlah pertimbangan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif dan jujur dalam proses per-

sidangan, terdakwa tidak menikmati keuntungan dari perbuatannya. Selain itu, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa sudah lama mengabdikan di Pemkab Karangasem.

Atas tuntutan itu, tim kuasa hukum terdakwa, Made Suka Ardana dan Hidayat Permana, akan mengajukan pledoi dalam sidang pekan depan. Sebelumnya, dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa kelahiran 19 Januari 1963 itu diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Wayan Arnawa (sudah divonis). Dalam perkara ini, terdakwa yang menjabat sebagai Asisten II Pemkab Karangasem bekerja berdasarkan SK Kadis Pekerjaan Umum (kala itu Arnawa). SK itu yakni tentang penunjukan pejabat pengelola administrasi keuangan daerah di Dinas PU tahun 2009.

Karena itu, terdakwa dalam perkara ini dinyatakan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Ir. Nyoman Arnawa selaku Kadis PU, yakni melakukan perbuatan secara melawan hukum. Caranya, kata jaksa, terdakwa bekerja berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem. Arnawa kemudian menunjuk PPTK yakni terdakwa sendiri dengan dibantu oleh PPK (pejabat pelaksana kegiatan) Ketut Sukarja.

Mereka bekerja untuk pengerjaan pengadaan konstruksi air bersih dan pengembangan air minum Kecamatan Manggis, Kubu. Hanya, saat pelaksanaannya, diduga ada penyimpangan, terutama soal spek yang digunakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan perjanjian kerja hingga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 3,7 miliar. (kmb37)

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal : 3



Wali Kota Rai Mantra Sampaikan Ranperda APBD Perubahan

Dirancang Rp 1,8 Triliun Lebih untuk Kepentingan Rakyat

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Denpasar 2015 dirancang Rp 1,8 triliun lebih. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp 79,88 miliar lebih dibandingkan anggaran induk yang hanya Rp 1,72 triliun lebih. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian pidato pengantar Ranperda APBD Perubahan 2015, Rabu (29/7) kemarin.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede didampingi para wakilnya. Wali Kota menjelaskan, sejumlah pos pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. PAD dirancang meningkat Rp 38,23 miliar lebih dari anggaran induk Rp 681,25 miliar lebih, menjadi Rp 719 miliar lebih. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, juga dirancang meningkat Rp 8,62 miliar lebih dari anggaran induk Rp 702,30 miliar lebih. Dengan demikian, target dana perimbangan setelah perubahan menjadi Rp 710,92 miliar lebih.

Dari sisi pengeluaran, terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, direncanakan Rp 2,02 triliun lebih, meningkat Rp 262,20 miliar lebih dibandingkan anggaran induk Rp 1,76 triliun lebih. Wali Kota Rai Mantra menjelaskan, belanja tidak langsung tersebut tidak hanya untuk belanja pegawai saja, tetapi

juga untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan seperti belanja hibah kepada masyarakat, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga.

Untuk belanja langsung, terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, dirancang sebesar Rp 1,18 triliun lebih. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp 163,70 miliar lebih dibandingkan anggaran induk yang hanya Rp 1,01 triliun lebih. Sedangkan belanja pegawai dirancang Rp 880,09 miliar lebih, meningkat Rp 50,03 miliar lebih dari anggaran induk Rp 830,05 miliar lebih. Peningkatan belanja

pegawai tersebut sebagian besar untuk belanja tunjangan profesi guru PNSD dan tunjangan penghasilan guru PNSD.

Wali Kota Rai Mantra juga menyampaikan, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat dirancang meningkat Rp 28,96 miliar lebih, dari anggaran induk Rp 72,36 miliar lebih menjadi Rp 101,33 miliar lebih. Demikian juga untuk bantuan sosial, dalam RAPBD Perubahan ini dirancang meningkat dari anggaran induk Rp 2,67 miliar lebih, menjadi Rp 3,27 miliar lebih pada anggaran perubahan. "Intinya, bagaimana alokasi anggaran dalam APBD Perubahan tahun ini kami pergunakan lebih banyak untuk program-program pembangunan yang pro-rakyat," ujar Rai Mantra. (ad1601)



RANPERDA - Wali Kota Denpasar menyerahkan Ranperda APBD Perubahan 2015 dalam sidang paripurna DPRD Denpasar, kemarin.

Edisi : Kamis, 30 Juli 2015

Hal : 2